



DINAMIKA PEREKONOMIAN ITALIA -UNI EROPA MASA PANDEMI COVID-19

Gilang Nur Alam¹, R.M.T. Nurhasan Affandi², Fuad Azmi³, Windy Dermawan⁴

¹²³⁴Departemen Ilmu Hubungan International, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia

g.n.alam@unpad.ac.id

ABSTRAK

Penyebaran pandemi virus corona membuat ekonomi global kewalahan dalam mempertahankan kestabilan kurva perdagangan yang saat ini tidak lagi menunjukkan kenaikan yang signifikan. Italia dibawah naungan Uni Eropa mengalami kekacauan ekonomi yang tak kalah merugikan sebab berbagai kebijakan yang diambil UE dan lambatnya penanganan dan bantuan. Temuan mengungkapkan bahwa peningkatan jumlah lockdown, keputusan kebijakan moneter sangat mempengaruhi tingkat kegiatan ekonomi. Melalui pendekatan merkantilisme yang telah diadopsi banyak negara di Eropa, peneliti menemukan adanya ketidakpastian tentang seberapa buruk situasi tersebut mengarah pada keselamatan dalam konsumsi dan investasi di antara konsumen, investor dan mitra dagang internasional. Penelitian ini berfokus pada periode dari awal 2020 hingga Maret ketika virus Corona mulai menyebar ke Italia dan Uni Eropa. Peneliti mengacu pada pengamatan kualitatif dalam menilai tindakan kebijakan Uni Eropa selama periodetersebut. Peneliti juga menguji secara empiris dampak kebijakan lockdown terhadap kegiatan ekonomi dan indeks ekspor impor.

Kata Kunci: Covid-19, ekonomi, Italia, Uni Eropa

PENDAHULUAN

Pada akhir tahun 2019, muncul sebuah virus di Wuhan, China, yang diberi nama Covid-19 atau *Corona Virus Disease 2019*. Virus tersebut ditandai dengan beberapa gejala ringan yang muncul bertahap, dimulai dari demam, rasa lelah, batuk kering, hidung tersumbat, pilek, sakit tenggorokan atau diare (WHO, 2020). Virus tersebut menjangkiti manusia dengan penularan yang sangat cepat. Saat ini hampir seluruh negara di dunia terkena wabah yang menjadi pandemi ini. Oleh karena itu, respons global yang terkoordinasi sangat diperlukan untuk mempersiapkan sistem kesehatan untuk memenuhi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Negara-negara yang kurang beruntung telah terekspos untuk penyakit ini sudah, secara paradoks, sangat berharga menjadi pelajaran untuk disampaikan. Saat ini, Italia adalah negara dengan jumlah kasus Covid-19 tertinggi ketiga setelah Amerika Serikat dan Spanyol. Pada 8 Maret 2020, Pemerintah Italia menerapkan langkah-langkah luar biasa untuk membatasi penularan virus, termasuk membatasi gerakan di wilayah Lombardy, dengan tujuan untuk meminimalkan kemungkinan orang yang tidak terinfeksi melakukan kontak dengan orang yang terinfeksi (Remuzzi & Remuzzi, 2020). Keputusan ini tentu berani dan penting, tetapi itu tidak cukup. Setelah memasuki Italia, Coronavirus (COVID-19) telah menyebar dengan cepat. Hingga 23 April 2020, jumlah total kasus yang dilaporkan oleh pihak berwenang mencapai 190 ribu. Bagian utara negara itu sebagian besar dilanda, dan wilayah dengan jumlah kasus terbanyak adalah Lombardy, yang mendaftarkan 70,2 ribu di antaranya. Wilayah tetangga Emilia-Romagna dan Piedmont masing-masing mendaftarkan 23.723 dan 23.140 kasus. Virus di negara ini telah menyerang sebagian besar individu yang berusia lebih dari 50 tahun (Barari, 2020).

Uni Eropa sebagai organisasi persatuan negara-negara di Eropa pun tampaknya kewalahan menghadapi pandemi ini. Pada 10 Maret 2020, para pemimpin Uni Eropa melakukan konferensi video tentang responsnya terhadap wabah Covid-19. Hasilnya, Komisi menerima mandat untuk lebih meningkatkan tanggapannya di semua lini dan mengoordinasikan tindakan Negara Anggota. Sebagai hasilnya, UE telah meluncurkan “Inisiatif Investasi Respons Corona” yang akan memobilisasi hingga € 37 miliar untuk mendukung sistem perawatan kesehatan



nasional, UKM, pasar tenaga kerja dan bagian ekonomi rentan lainnya (EU, 2020). Selain itu, Komisi telah mengadopsi Kerangka Sementara yang memungkinkan Negara-negara Anggota untuk menggunakan fleksibilitas penuh yang diramalkan di bawah aturan bantuan

Negara untuk mendukung ekonomi dalam konteks wabah COVID-19. Ini memastikan bahwa likuiditas yang cukup tetap tersedia untuk bisnis dari semua jenis dan untuk menjaga kelangsungan kegiatan ekonomi selama masa-masa sulit ini. Pada 2 April, Komisi meluncurkan inisiatif baru yang dirancang untuk melindungi pekerjaan dan pekerja yang terkena dampak wabah COVID-19, yang diberi nama “dukungan sementara yang memitigasi inisiatif Pengangguran Risiko dalam Keadaan Darurat” atau *Support mitigating Unemployment Risks in Emergency* (SURE). Inisiatif SURE akan memberikan bantuan keuangan hingga € 100 miliar total kepada Negara-negara Anggota dalam bentuk pinjaman yang diberikan dengan persyaratannya yang menguntungkan. Pinjaman ini akan membantu Negara-negara Anggota untuk menutup biaya skema kerja jangka pendek nasional yang diberlakukan untuk mempertahankan pekerjaan dan membantu wiraswasta selama krisis.

Terhadap Italia sendiri, Uni Eropa baru memberikan kebijakan berupa mendorong beberapa negara di Eropa untuk membantu Italia, walaupun harus bersitegang terlebih dahulu dan dengan beberapa diskusi berat dan waktu yang lama, hasilnya Perancis telah menyumbangkan 1 juta masker ke Italia dan Jerman telah mengirimkan tujuh ton peralatan medis ke Italia, termasuk ventilator dan masker anestesi. Serta, lebih dari 200 pasien perawatan intensif dari Italia telah terbantu pengobatannya dengan perawatan yang lebih terfokus di rumah sakit di Jerman, Austria, dan Luxemburg. Namun, kebijakan Uni Eropa pada awalnya mengalami ketidakseimbangan atau ketidaksetaraan yang diberikan kepada negara yang lebih membutuhkan di Eropa, seperti Italia. Setelah krisis migrasi dan zona euro, respons Uni Eropa yang awalnya buruk telah memperkuat kekhawatiran bahwa blok tersebut tidak mau membantu ketika Italia sangat membutuhkan. UE perlu bekerja keras untuk membatasi lonjakan Euroscepticism di Italia. Apalagi ketika *lockdown* terjadi di negara Italia, Uni Eropa dan negara-negara anggotanya berpaling sementara negara-negara yang jauh seperti Rusia dan Cina datang untuk membantu. Namun demikian, risikonya adalah bahwa banyak kerusakan telah dilakukan terhadap reputasi UE di Italia, karena persepsi awal tidak akan mudah bergeser. UE sejauh ini juga gagal mengomunikasikan perbuatan baiknya kepada publik Italia. Hal ini telah memberikan kebebasan politisi eurooptik untuk mendorong perpecahan antara negara-negara Eropa memperdalam fase krisis berikutnya (Scazzieri, 2020).

Sebagai negara bersama-sama tergabung dalam Uni Eropa, Presiden Sergio Mattarella, selaku Presiden Italia, yang sangat jarang melakukan intervensi dalam perselisihan politik, telah mengeluarkan beberapa pernyataan kritis tentang kurangnya kemauan untuk membantu Italia, dengan mengatakan bahwa solidaritas adalah demi kepentingan semua negara anggota. Kritik terhadap pendekatan Eropa terhadap krisis *coronavirus* tidak hanya datang dari euroceptics. Orang-orang Italia yang pro-Eropa juga kritis terhadap ketidakmampuan negara anggota lain untuk memahami sifat krisis yang luar biasa dan mendesak dan meresponsnya. Dengan diadakannya *lockdown* di Italia, tentunya Italia harus bisa mengembalikan atau mempertahankan keseimbangan ekonominya. Ekonomi Italia akan berjuang untuk kembali ke pertumbuhan jika pemerintah tidak memiliki kelonggaran fiskal untuk memulainya, dan pasar keuangan juga akan memiliki keraguan tentang apakah utang Italia pada tingkat tinggi tersebut berkelanjutan. Italia akan membutuhkan kombinasi skema Uni Eropa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, dan dukungan *European Central Bank* (ECB) untuk menjaga biaya pembiayaan utang sangat rendah. Dalam kebijakan luar negeri, Roma mungkin akan mencari hubungan yang lebih dekat dengan Cina dan Rusia, membuatnya jauh lebih sulit bagi UE untuk merumuskan kebijakan yang koheren terhadap mereka.

Berbagai skenario muncul ketika Uni Eropa tidak memberikan bantuan, dimana Italia dibiarkan bergerak sendiri dan gagal membayar hutang-hutang negaranya saat pandemic ini berlangsung. Namun, oleh para petinggi Uni Eropa opsi ini kemungkinan akan dihindari, karena hal ini akan merusak mata uang di Eropa yaitu euro dan negara anggota lainnya. Hal yang menjadi pertimbangan lain adalah Uni Eropa dapat mendorong para pemimpin Eropa untuk menjaga Italia tetap aman, namun tidak akan menghasilkan pemulihan ekonomi yang substansial. Dan bagi



rakyat Italianya sendiri, ketika negara lain terlalu besar melakukan intervensi politik dengan membawa alasan kemanusiaan, hal ini akan berdampak pada pemilihan pemimpin negara selanjutnya, yang akan cenderung condong dan pro terhadap kebijakan Uni Eropa dan muncul ketakutan akan kurangnya perhatian terhadap kebutuhan dari masyarakat Italianya sendiri.

Saat ini, negara-negara di Uni Eropa (UE), khususnya Italia sebagai negara dengan tingkat kematian yang tinggi, tengah kewalahan sebab dihadapkan pada perpecahan ekonomi yang cukup serius akibat pandemi virus corona (COVID-19). Sebelumnya, para pemimpin UE telah berusaha merumuskan kebijakan untuk mendukung ekonomi negara anggota yang paling terkena dampak dari pandemi tersebut seperti Italia dan Spanyol, akan tetapi kebijakan tersebut gugur karena tidak mencapai kata sepakat dari seluruh negara anggota. Negara anggota masih mempertimbangkan keuntungan dan kepentingan nasional dalam regulasi ekspor dan impor dari kebijakan baru yang diusulkan oleh UE. Dalam kajian ini, peneliti menggunakan pendekatan teori merkantilisme sebagai acuan dalam mengkaji dinamika ekonomi yang dihadapi Italia dan UE.

Dasar dari teori merkantilisme ialah kebijakan pembangunan ekonomi nasional yang kuat melalui pembatasan impor dan peningkatan kuota ekspor. Teori merkantilisme banyak dijadikan sebagai prinsip perdagangan internasional bagi negara-negara di Eropa dalam rangka menjamin kesatuan politik dan kekuatan ekonomi nasionalnya. Sistem dagang tersebut biasa disebut dengan *The Commercial or Mercantile System* yang dipelopori oleh tokoh ekonomi klasik yaitu Adam Smith (Humphrey, 2016). Dalam perkembangannya, merkantilisme mengalami bangkit dan tenggelam sejak kemunculannya pada abad ke-16 di Eropa. Pada era feodal, mulai terbentuk negara-bangsa tunggal yang independen. Terbentuknya sebuah negara diiringi dengan kebutuhan yang melekat untuk memproteksi diri. Teori merkantilisme dapat diterapkan sebagai bagian dari proteksi ekonomi yang dipraktekkan semua negara dari masa ke masa. Merujuk pada pendapat para penganut Merkantilisme yang menyatakan bahwa satu-satunya cara bagi negara untuk menjadi kaya dan kuat adalah dengan melakukan ekspor sebanyak mungkin dan mengurangi tingkat impor, maka suatu negara hanya dapat memperoleh keuntungan dengan mengorbankan negara lain. Dalam hal ini, berarti perdagangan internasional bersifat *zero-sum game*. Oleh karena itu, muncul konflik kepentingan antar negara khususnya ditengah kondisi kritis seperti halnya ancaman resesi ekonomi akibat pandemi COVID-19 yang tengah melanda hampir seluruh negara di dunia. (Irvin, 2010)

Namun, hal tersebut memicu kekhawatiran akan munculnya pengaruh neo-merkantilis yang diakibatkan semakin tingginya tingkat pengangguran yang diakibatkan resesi ekonomi. Hingga kemudian mendorong pemerintah untuk melakukan restriksi terhadap impor agar dapat mendorong kembali produksi domestik dan kesempatan kerja. Terdapat empat gagasan utama dari teori merkantilisme, yakni (1) pertimbangan terhadap suatu barang, (2) sikap terhadap penjualan barang, (3) keinginan negara untuk menimbun logam mulia, (3) ketidaksenangan terhadap suku bunga. Di masa modern seperti sekarang, beberapa aspek dari merkantilisme dianggap masih relevan khususnya bagi negara-negara di Eropa. Merkantilisme digunakan dalam pertimbangan berbagai hambatan non-tarif yang digunakan negara dengan istilah “pasar bebas” guna memproteksi industri dalam negeri yang sangat privat (Wiener, 2009). Pemberlakuan lisensiekspor dan impor, karantina dan pemblokiran perdagangan hanya merupakan manifestasi dari proteksionisme merkantilis.

Dalam banyak perekonomian tertutup atau semi-tertutup di dunia, proteksi atas produsen domestik masih sangat kuat. Maka dari itu, UE terkesan lamban dalam mengambil keputusan karena mencegah adanya konflik kepentingan antar negara anggota. Negara-negara anggota sangat menekankan kepada para pemimpin UE untuk mengusulkan kembali kebijakan yang lebih fokus pada penyelamatan dunia usaha dan para pekerja atau masyarakat secara individu maupun kelompok yang terkena dampak wabah ini. Walaupun, pada akhirnya semua negara cukup paham bahwa kebijakan tersebut sangat beresiko memicu gelombang resesi ekonomi yang lebih besar lagi di Benua Biru tersebut.

Berdasarkan pemaparan mengenai latar belakang masalah serta teori yang akan digunakan dalam kajian ini, didapatkan tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana dinamika hubungan khususnya pada bidang ekonomi antara Italia dan Uni Eropa sebelum dan



selama pandemi Covid-19 yang berlangsung pada saat ini. Seperti yang kita tahu bahwa pandemi yang disebabkan virus corona ini, sedang dan telah menyebar ke berbagai belahan dunia ini membuat semua orang di dunia panik dan harus melindungi diri mereka agar tidak terjangkit virus ini maupun efek dari pandemic yang dapat dirasakan oleh siapapun mulai dari pasien hingga para pembuat kebijakan sekalipun (Torales, O'Higgins, Castaldelli-Maia, & Ventriglio, 2020). Berkenaan dengan dampak tersebut, artinya negara pun tidak terlepas dari dampak yang ditimbulkan karena ia sebagai pelindung warga negaranya sehingga harus menetapkan kebijakan yang sesuai dengan kondisi terbaru di negaranya, seperti yang dilakukan Italia.

Italia yang memberlakukan kebijakan *lockdown* di negaranya ini justru menciptakan kondisi baru terutama dalam ekonominya. Ekonomi yang semakin menurun akibat dari keharusan negara untuk penanganan terhadap virus ini membuat dinamika ekonomi di Italia bergejolak. Bantuan di Italia pun dirasa dibutuhkan disini terutama bantuan ekonomi dari negara-negara anggota Uni Eropa sebagai jalan pertama untuk mendapat bantuan. Dinamika hubungan ekonomi antara Italia dan Uni Eropa dalam masa pandemi inilah yang menjadi fokus dalam kajian ini.

METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan eksplanatori serta penggunaan data-data sekunder yang didapatkan melalui studi pustaka (buku dan artikel jurnal) dan daring (situs internet dan portal berita elektronik) yang relevan dengan penelitian ini. Penggunaan metode kualitatif dalam artikel ini, dirasa mampu untuk mendiskusikan isu sosial sehingga akan didapatkan pemahaman dan deskripsi yang mendalam mengenai isu yang dibahas namun tetap relevan dengan data-data yang didapat.

Selaras dengan kajian ini pula, penggunaan metode kualitatif terasa cocok untuk menggambarkan fenomena yang terjadi saat ini yaitu pandemic Covid-19 yang mampu mengguncang negara-negara di berbagai aspeknya terutama pada kesehatan ekonominya. Dengan begitu, informasi yang didapat dari pengumpulan sumber data-data ini cocok untuk menghasikan gambaran dan deskripsi yang jelas, sistematis dan detail mengenai fenomena dinamika hubungan ekonomi yang terjadi pada Italia dan Uni Eropa sejak kemunculan Covid-19 ini.

HASIL DAN DISKUSI

Hubungan Ekonomi Italia dan Eropa

Seperti yang kita tahu, pandemic COVID-19 saat ini sedang menyerang hampir ke seluruh bagian dunia yang ada tidak terkecuali negara Italia. Italia sendiri justru menjadi salah satu negara yang terdampak parah oleh virus ini dan memiliki angka kematian akibat COVID-19 yang tinggi. Oleh karena itu, Italia pun akhirnya memberlakukan *lockdown* di negaranya agar penularan Corona virus tidak semakin menjadi di negaranya. Dengan adanya *lockdown* ini, sudah pasti seluruh aktivitas di negaranya tertunda atau berhenti untuk sementara waktu termasuk untuk kegiatan ekonominya baik secara internal maupun eksternal yang mana artinya *lockdown* juga akan mempengaruhi kegiatan ekonominya bersama negara-negara lainnya. Sebagai salah satu negara anggota Uni Eropa, tentunya hubungan ekonomi Italia dengan Uni Eropa perlu disorot pada saat maupun sebelum pandemic ini berlangsung karena pasti terdapat beberapa perbedaan di keduanya terutama setelah pandemic ini melanda dunia. Bergabung dalam Uni Eropa pada tanggal 1 Januari 1958, Italia telah berhasil menjadi negara yang cukup berpengaruh dalam Uni Eropa. Namun sebelum itu, Italia dahulu dipandang sebagai negara yang lemah karena otoritas politik eksekutif yang ada terbatas sehingga tujuan dari kebijakannya sendiri tidak bisa dicapai mereka termasuk kebijakan ekonominya atau dalam arti lain mereka tidak mempunyai kemampuan untuk memberikan arahan yang kuat dan pasti dalam mengarahkan negara-bangsa untuk bisa melewati arus ekonomi yang bermasalah. Hal tersebut tentu saja menghalangi jalan Italian ke Eropa itu sendiri karena negara dengan kapasitas manajemen ekonomi yang lemah dan tidak terarah justru akan rentan nantinya terhadap kekuatan transformasi pasar dan otoritas supranasional dari Uni Eropa itu sendiri. Namun justru hal itu yang membangkitkan Italia untuk semakin meningkatkan otoritas Italia dalam pembuatan kebijakan mengenai ekonomi mereka meskipun harus dalam bentuk tekanan sekalipun (Sala, 1997)



Usaha Italia dalam pengembangan diri terhadap manajemen ekonominya oleh otoritas eksekutif harus dihadapkan kepada tantangan yang akan memperlambat laju perkembangan tersebut, seperti fenomena resesi yang terjadi pada awal tahun 1980an. Resesi ini berpengaruh pada kesepakatan di antara negara-negara anggota dan para elit bisnis yang tergabung dalam komunitas yang bernama European Community (EC). Dengan berpusat pada peran negara dalam manajemen ekonomi, resesi ini menekankan pada kebijakan negara dalam pengadaan ‘uang sehat’ yang meninggalkan politik dari proses pembuatan kebijakan moneter. Peristiwa ini menjadi titik awal Eropa untuk menyelesaikan persoalan pasar internal pada pertengahan tahun 1980 yang dibantu oleh perubahan kebijakan di Perancis, pemerintah konservatif di Jerman dan Inggris serta mobilisasi yang dilakukan oleh elit bisnis Eropa. Dengan begitu, upaya liberalisasi pergerakan barang, modal dapat meningkat agar tidak hanya berputar pada EC saja tetapi juga ke dalam negara-negara anggota. Upaya yang dilakukan tersebut pun pada akhirnya menghasilkan negosiasi yang mengarah pada komitmen dan kesepakatan untuk mencapai kesatuan ekonomi dan moneter yang diabadikan dalam Perjanjian Maastricht tahun 1992. Dari sinilah hubungan antara Italia dan Eropa terasa di redefinisi karena sistem-sistem di Italia terutama sistem politik dan ekonominya mulai sangat berubah pada tahun 1990an. Begitu juga Uni Eropa yang seperti ditransformasikan sebagai *Economic and Monetary Union* (EMU) yang dibentuk pada tahun 1999 (Quaglia, 2007),

Berkenaan dengan Uni Eropa yang seakan bertransformasi menjadi EMU, ini menimbulkan dampak dari kebijakan utama UE terhadap negara Italia yang membuat proses pembuatan kebijakan itu sendiri mengalami fase naik dan turun dan berefek pada lembaga-lembaga nasional yang mengakibatkan Italia kurang diperhatikan oleh Uni Eropa dan diabaikan kontribusinya dalam pembuatan kebijakan Uni Eropa. Ini justru malah menyebabkan Italia menunjuk Eropa sebagai sumber pengekangan dan kekakuan fiskal (Sala, 1997). Akibatnya selama dekade 2000an kesenjangan meningkat, bukan hanya di Italia saja tetapi juga di antara negara-negara Eropa

Selatan dan Eropa Utara, perdagangan luar negeri (ekspor) semakin menurun, daya saing perusahaan semakin memburuk dan perdagangan eksternal mengalami defisit (Garofoli, 2016).

Dengan ‘kondisi’ yang seperti itu, hal ini sejalan dengan semakin berkurangnya kepercayaan mayoritas masyarakat Italia terhadap Uni Eropa karena mereka mulai khawatir terhadap perkembangan ekonomi mereka. Semakin memburuk, saat krisis ekonomi dan keuangan tahun 2007-2008, ekonomi Italia pun terpukul karena krisis ini mulai mendatangkan berbagai macam efek yang lebih mengarah ke negatif kepada variabel ekonomi riilnya termasuk lembaga-lembaga yang ada di Italia, dan pada saat ini pun Eropa tidak siap menghadapi tantangan eksternal seperti ini sehingga belum ada solusi yang dapat diambil pada saat itu (Conti, Di Mauro, & Memoli, 2020).

Hal tersebut menyebabkan pula pertumbuhan produktivitas yang sangat lemah dan begitu rendah sehingga pasar Italia dianggap tidak menguntungkan—walaupun tidak keseluruhan. Oleh karena itu, beberapa perusahaan mencoba untuk berkontribusi demi mengatasi kontradiksi ekspor dan menurunnya daya saing tersebut khususnya di negara-negara Eropa karena merekalah yang menjadi mitra dagang utama Italia. Italia sendiri mengatur persentase ekspor impornya hampir sebanyak 44% untuk impor dan 48% untuk ekspor, komoditas-komoditas yang mereka tawarkan pada negara-negara di Eropa pun utamanya adalah tekstil, produk makanan, barang-barang manufaktur dan mobil. Dalam hal ini, Italia secara langsung bergantung kepada kondisi ekonomi di negara-negara utama Uni Eropa seperti Jerman, Perancis dan Inggris.

Namun terlepas dari itu semua, setelah krisis pada tahun 2008 tersebut terjadi, di tahun-tahun berikutnya Euroscepticism semakin bertumbuh didalam masyarakat Italia ditambah dengan ‘tuntutan’ untuk melakukan penghematan dari Brussels yang dimandatkan kepada Mario Monti, dimana dorongan tersebut menyebabkan akibat yang fatal bagi para elit yang bahkan pro-Eropa Italia. Tidak hanya itu saja, ketakutan akan migrasi yang tak terkendali pun juga menjadi salah satu dasar ketidakpercayaan Italia terhadap Uni Eropa karena mereka tidak mampu menanganinya secara serius dan baik sehingga mengakibatkan Italia harus turun tangan dan berjuang untuk mengatasi masalah migrasi dan ekonomi ini. Dengan begitu, hal tersebut pun akhirnya menjadi dilemma yang berkaitan dengan negara anggota lainnya bagi Italia itu sendiri (Balfour & Robustelli, 2019).



Italia pun juga masih dihantui dengan hutang publik yang mencapai lebih dari 130% dari PDB mereka pada tahun 2018 dimana angka ini melanggar aturan yang dibuat oleh Uni Eropa karena berada jauh di atas batas 60% yang diwajibkan oleh aturan Uni Eropa. Melonjaknya hutang publik ini disebabkan oleh kebijakan Italia seakan tidak peduli terhadap ‘bencana’ yang telah menyerang selama beberapa dekade ini sehingga situasi politik tidak memiliki komitmen terhadap pendisiplinan anggaran ini dan menciptakan kondisi ekonomi yang tidak stabil yang mana ini mengganggu prospek pengurangan hutang ini sendiri (Girardi, 2018). Kondisi ketidakstabilan ekonomi Italia tersebut membuat Uni Eropa harus turun tangan dan mendesak para pemimpin negaranya untuk segera mengambil tindakan pengurangan hutang mereka agar Uni Eropa yang notabeneanya memiliki kekuatan untuk menjatuhkan hukuman seperti mengenakan denda, memotong pendanaan, memerintah pemotongan pengeluaran dan menaikkan pajak tidak dijatuhkan pada Italia (Bremmer, 2019).

Dampak Kebijakan Ekonomi Uni Eropa Terkait Covid-19 Terhadap *Outbreak* Ekonomi Italia

Ketika China sebagai negara asal dari adanya virus Covid-19 mengalami *lockdown*, negara-negara di sekitarnya seperti Korea Selatan dan Jepang pun turut terkena dampak dari virus yang telah menjadi pandemic ini. Setelah menyebar ke hampir seluruh wilayah Asia, Covid-19 menyebar lebih luas lagi ke daratan Eropa. Italia menjadi negara yang memiliki dampak terbesar di negaranya yang disebabkan oleh Covid-19. Banyak spekulasi bermunculan, mengapa negara maju seperti Italia dapat mengalami penyebaran virus corona dengan cepatnya? Mungkin jawabannya ialah karena respons awal dari negara Italia sendiri yang kurang menanggapi dengan bijak adanya virus ini dan juga kondisi dari negara Italia sendiri. Italia memiliki populasi tertua kedua di dunia, dan wabah ini telah membunuh sejumlah besar orang di usia 80-an dan 90-an (Longman, 2020). Di Italia, 23% populasi berusia di atas 65 tahun, dibandingkan dengan AS, yang populasinya 16%. Menjadi jelas bahwa perkembangan dan dampak pandemi ini mungkin sangat terkait dengan komposisi demografis populasi di Italia. Di kota-kota kecil di utara Italia, di mana sistem kekeluargaannya telah terjalin baik, dengan ditunjukkannya kerukunan antar tetangga, virus menyebar dengan cepat di antara populasi lansia yang masih sering tinggal dengan anggota keluarga yang lebih muda, daripada di panti jompo yang lebih populer di bagian lain Eropa atau di Amerika. Faktor lain yang menjadi penyebab cepat menyebarnya Covid-19 di Italia adalah tidak ada banyak ruang di Italia bagi orang-orang untuk menyebar. Italia adalah negara berpenduduk padat, dengan kepadatan rata-rata 533 orang per mil persegi. Sebagai perbandingan, Jerman memiliki kepadatan populasi 235 orang per mil persegi, sedangkan AS memiliki 94 orang per mil persegi.

Sejak penyebaran pertamanya pada 29 Januari yang terdeteksi pada dua turis China, pihak berwenang telah menyusun sistem perlindungan teraman di Eropa. Perdana Menteri Italia, Giuseppe Conte, menyatakan keadaan darurat selama 6 bulan dan menjadikan negara pertama yang memblokir penerbangan dari China (Perrone, 2020). Upaya pemberlakuan karantina nasional yang dilakukan oleh Giuseppe Conte merupakan sebuah tindakan sebagai upaya untuk keluar dari kondisi yang kemungkinan kedepannya lebih buruk dan dianggap sebagai langkah yang mungkin tampak drastis, tetapi mungkin juga satu-satunya jalan pintas untuk membatasi penyebaran. Conte mengatakan pada 9 Maret, bahwa pemerintah akan mengerahkan "*terapi kejut besar-besaran*" untuk melindungi ekonomi. Wakil Menteri Ekonomi Italia, Laura Castelli, mengatakan hipotek, pajak, semuanya ditangguhkan sebagai akibat dari *lockdown*. Pemerintah juga telah menciptakan paket dukungan \$ 8,5 miliar untuk keluarga dan bisnis yang terkena virus. Beberapa ahli ekonomi khawatir tentang implikasi jangka panjang dari pengeluaran ini. Dihadapkan dengan pilihan antara kesehatan masyarakat dan ekonomi, para politisi di seluruh bagian pemerintahan berusaha untuk untuk mengurangi kemerosotan ekonomi, mengirimkan pesan yang beragam kepada penduduk. Di bawah undang-undang *lockdown* yang baru, orang dapat diberikan denda untuk bepergian di dalam atau di luar negara tanpa izin. Semua acara publik dilarang dan sekolah telah dibatalkan di seluruh negeri. Ruang publik, seperti gedung olahraga, teater dan bioskop, juga telah ditutup oleh pemerintah. Orang-orang yang menentang penguncian



bisa menghadapi hukuman tiga bulan penjara atau denda \$ 234. Aturan baru ini melarang tahanan untuk mendapatkan pengunjung atau pembebasan hari, yang memicu protes di 27 penjara di seluruh negeri (Godin, 2020). Kekhawatiran sesungguhnya sekarang adalah sistem perawatan kesehatan Italia - tidak banyak layanan kesehatan nasional yang dapat bertahan sehingga banyak orang lanjut usia yang membutuhkan perawatan intensif untuk waktu yang lama. Staf rumah sakit yang kewalahan harus membuat keputusan yang menyedihkan, dimana petugas kesehatan harus memilih siapa yang harus dirawat dan siapa yang harus mereka biarkan meninggal.

Pada 10 Maret 2020 diadakan konferensi video tentang cara menanggapi adanya pandemi Covid-19. Konferensi itu dilakukan dengan agenda diskusi oleh Anggota Dewan Eropa, Presiden *European Central Bank* (ECB), Presiden dan perwakilan tinggi *Eurogroup*. *Eurogroup* telah menyusun serangkaian tindakan nasional dan Eropa pertama sambil menetapkan kerangka kerja untuk tindakan lebih lanjut untuk menanggapi perkembangan dan untuk mendukung pemulihan ekonomi. Perkiraan awal Komisi Eropa menunjukkan bahwa total dukungan fiskal untuk ekonomi akan sangat besar. *Eurogroup* sejauh ini telah memutuskan langkah-langkah fiskal sekitar 1% dari PDB, rata-rata, untuk tahun 2020 untuk mendukung perekonomian, di samping dampak stabilisator otomatis, yang seharusnya bekerja sepenuhnya. Dan telah berkomitmen untuk menyediakan fasilitas likuiditas setidaknya 10% dari PDB, yang terdiri dari skema jaminan publik dan pembayaran pajak tangguhan. Angka-angka ini bisa jadi jauh lebih besar ke depan (Eurogroup, 2020). *Eurogroup* telah membuat langkah-langkah dari tanggapan untuk mengkoordinasikan keuangan Eropa, khususnya yang menerapkan sistem mata uang Euro, dalam upaya untuk melindungi ekonomi negara Eropa, seperti:

1. Semua otoritas nasional akan memungkinkan stabilisator otomatis berfungsi dan selain itu menerapkan semua tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa konsekuensi ekonomi dari COVID-19 ditangani dan bahwa mereka tidak membahayakan pencapaian ekonomi dan sosial. Penerapan yang dapat dilakukan adalah Pengeluaran fiskal segera yang ditargetkan pada penahanan dan pengobatan penyakit, dan dukungan likuiditas untuk perusahaan yang menghadapi gangguan parah dan kekurangan likuiditas, terutama UKM dan perusahaan di sektor dan daerah yang terkena dampak parah, termasuk transportasi dan pariwisata
2. Melakukan upaya koordinasi di tingkat Eropa dalam melengkapi langkah-langkah nasional.
Terdapat langkah nasional yang disambut oleh *Eurogroup* seperti: (1) Menyambut inisiatif Komisi dan Grup EIB untuk memobilisasi hingga € 8 miliar pinjaman modal kerja untuk 100.000 perusahaan Eropa, didukung oleh anggaran Uni Eropa, dengan meningkatkan program-program untuk menjamin kredit bank kepada UKM, (2) Menyambut paket langkah-langkah kebijakan moneter yang diambil oleh ECB minggu lalu yang bertujuan mendukung likuiditas dan kondisi pendanaan untuk rumah tangga, bisnis dan bank, membantu kelancaran pemberian kredit kepada ekonomi riil, dan menghindari fragmentasi pasar keuangan kawasan euro agar untuk menjaga kelancaran transmisi kebijakan moneter.
3. Merefleksikan ketahanan rantai nilai strategis Eropa untuk lebih melindungi Eropa dari gangguan produk dan pasar modal di masa depan. *Eurogroup* telah secara signifikan memperkuat kerangka kerja manajemen krisis, termasuk dengan pendirian ESM.

Dampak yang ditimbulkan dari kebijakan *lockdown* Italia merugikan di berbagai sektor, khususnya sektor perekonomian. Tempat-tempat wisata yang terbengkalai, hotel-hotel kosong dan restoran-restoran yang sepi akan pengunjung adalah harga yang mahal yang harus dibayar Italia. Kebijakan *lockdown* mendorong Italia ke dalam resesi. Bank Berenberg diperkirakan akan turun 1,2% tahun ini. Lombardy, wilayah yang paling terkena dampak wabah ini, merupakan seperlima dari PDB Italia. Sektor pariwisata Italia, yang merupakan 13% dari PDB negara itu, diproyeksikan akan kehilangan \$ 8,1 miliar, menurut Associated Press, sebagai hasil dari 32 juta lebih sedikit pelancong asing (Godin, 2020). Hutang luar negeri yang ditanggung oleh Italia sebelum wabah ini melanda pun tidak bisa dibilang sedikit, Italia sudah berjuang dengan hutang publik yang sebesar 134% dari PDB negara itu. Di Uni Eropa, negara-negara tidak seharusnya



memiliki hutang yang lebih tinggi dari 60% dari dari PDB negara mereka. Perlambatan ekonomi di Italia, sebuah negara di zona euro, akan berdampak pada seluruh benua.

Regulasi Ekonomi Uni Eropa Terhadap Italia Selama *Lockdown*

Aktivitas sektor ekonomi jatuh di seluruh Eropa pada bulan Maret ketika *lockdown* coronavirus mengakibatkan penurunan bulanan terbesar negara-negara UE ke tingkat yang menunjukkan kontraksi ekonomi yang parah sedang berlangsung. Keruntuhan ekonomi dari keputusan Italia yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk *me-lockdown* hampir sepertiga dari populasinya karena coronavirus. Para pemimpin Eropa khawatir terhadap dampak mematikan Covid-19 yang telah mengakibatkan krisis kesehatan skala penuh yang kemudian memiliki konsekuensi terhadap sektor ekonomi (El-Erian, 2020). IMF mengemukakan penurunan dalam output pada tahun ini akan mengakibatkan kemerosotan terdalam sejak proses integrasi UE yang dimulai tahun 1950-an. Bahkan, IMF juga memperkirakan ekonomi Italia menyusut lebih dari 9% tahun ini dan rasio utang terhadap PDB meningkat 20 poin persentase menjadi 156%. Permasalahannya adalah bahwa UE gagal bertindak secara kolektif pada saat negara-negara seperti Italia sangat membutuhkan bantuan. Secara keseluruhan, ada kurangnya koordinasi, negara-negara memberlakukan pembatasan mereka sendiri, memberlakukan kontrol perbatasan mereka sendiri, dan melarang ekspor pasokan medis yang sangat dibutuhkan. Italia menerima bantuan lebih cepat dari Tiongkok daripada dari mitra UE-nya (Financial Times, 2020). Terdapat cara anggota EU lainnya dalam memberikan bantuan pada Italia. Didukung oleh Perancis, Spanyol dan tujuh anggota EU lainnya, Italia mengusulkan agar Uni Eropa mengeluarkan "*coronabonds*", yakni instrumen utang yang memungkinkan semua negara yang menggunakan mata uang tunggal untuk meminjam secara kolektif. Secara efektif, akan ada kumpulan risiko antara negara yang menikmati peringkat kredit yang kuat, seperti Jerman dan Belanda dan negara yang memiliki peringkat kredit yang buruk, seperti Italia. Namun, Jerman dan Belanda secara konsisten menentang gagasan mutualisasi utang, terlepas dari keadaan keuangan publik Italia yang buruk.

UE saat ini tidak memiliki kemampuan untuk bertindak seperti yang dilakukan FDR. Hanya memiliki anggaran kecil, tidak ada menteri keuangan tunggal dan tidak ada cara mengeluarkan utang kolektif. Ini adalah masa tersulit bagi Eropa sejak 1930-an. Di Prancis, Italia dan Spanyol, perpindahan orang ke layanan yang melibatkan kelompok orang, seperti ritel dan rekreasi, telah turun lebih dari 80 persen. Variasi dalam tingkat keparahan *drop* menunjukkan bahwa dampak ekonomi langsung dari coronavirus cenderung menjadi lebih besar di ekonomi Eropa Selatan dan Prancis daripada di negara-negara utara dimana level *lockdown* lebih ringan. Data *International Trade Administration* (ITA) menyatakan bahwa tujuan ekspor terbesar ketiga Italia adalah Amerika Serikat, yang mencapai total nilai ekspor negara itu ke AS sebesar \$ 50,1 miliar pada tahun 2018. Sektor usaha kecil dan menengah (UKM) Italia memiliki proporsi yang cukup besar dari perusahaan yang menyumbang sekitar sepertiga dari nilai ekonomi dan setengah dari total lapangan kerja di negara ini. Karena struktur ekonomi Italia sangat tergantung pada UKM, penyebaran coronavirus secara signifikan mempengaruhi perekonomian Italia. UKM bergantung pada pinjaman dan keuangan untuk memenuhi persyaratan bisnis mereka. Karena kerentanan yang dihadapi oleh sektor keuangan Italia di tengah COVID-19, operasi UKM terkena dampak negatif, yang pada gilirannya, mengarah pada penurunan signifikan ekonomi Italia. Berdasarkan klasifikasi industri, ekonomi Italia tersegmentasi menjadi mobil, makanan & minuman, penerbangan, BFSI, ritel, perjalanan dan pariwisata, kesehatan, peralatan pelindung diri, dan lainnya. Karena epidemi COVID-19, pemerintah Italia telah menerapkan strategi penguncian untuk membatasi pandemi COVID-19. Akibatnya, perusahaan mobil besar sementara menutup pabrik mereka untuk meminimalkan penyebaran virus corona. Sebagai contoh, di Italia, Ferrari S.p.A. telah menanggguhkan produksi selama dua minggu ditambah dengan perintah pemerintah Italia untuk penutupan secara nasional karena epidemi COVID-19. Di sektor kesehatan, ada lonjakan permintaan untuk pasokan dan peralatan rumah sakit di tengah efek COVID-19 di negara ini. Pemerintah Italia telah meminta Siare Engineering International Group s.r.l., untuk menambah produksi ventilator dari 160 menjadi 500 per bulan, karena jumlah korban



tewas melebihi 5.000. Selanjutnya, General Electric Co, Honeywell, dan 3M meningkatkan upaya mereka untuk produksi peralatan rumah sakit untuk memerangi virus corona.

SIMPULAN

Pandemi yang melanda Italia berdampak pada berbagai aspek, terutama sektor ekonomi. Kebijakan yang diambil untuk merespon pandemi ini berdampak positif dan negatif. Kebijakan jarak sosial dan *lockdown* sedang diberlakukan dapat memicu resesi. Peneliti menemukan bahwa kebijakan jarak sosial atau *lockdown* merugikan ekonomi melalui pengurangan tingkat kegiatan ekonomi umum dan melalui efek negatifnya pada regulasi ekspor dan impor. Resesi yang terjadi di UE maupun Italia adalah cerminan dari pilihan sulit yang harus diambil oleh pembuat kebijakan dalam memilih apakah akan menyelamatkan ekonomi sebelum menyelamatkan rakyat atau menyelamatkan rakyat sebelum menyelamatkan ekonomi.

Banyak negara anggota UE mengkritik bahwa kebijakan itu terlalu cepat, prematur atau tidak cukup, dan bahwa kebijakan tersebut bertentangan satu sama lain di beberapa bidang, misalnya, kebijakan moneter akomodatif mendorong agen ekonomi untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi sementara *lockdown* mencegah kegiatan ekonomi berlangsung.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Keterbatasan utama dari penelitian ini adalah periode analisis pendek karena dataset terbatas. Penelitian yang lebih lama dapat menangkap konsekuensi sosial ekonomi dari kebijakan yang diambil Italia dan juga Uni Eropa selama masa pandemi. Selain itu, di masa mendatang, mungkin ada limpahan ke sektor lain yang tidak dianalisis dalam penelitian ini. Saran untuk penelitian di masa mendatang dapat diperluas ke dua arah. Pertama, penelitian di masa depan dapat menguji dampaknya terhadap kebijakan terhadap perekonomian informal. Kedua, penting untuk mengeksplorasi bagaimana bank dan lembaga keuangan bereaksi terhadap perkembangan kebijakan ekonomi selama pandemic Covid-19.